

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu kewajiban Pemerintah sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kewajiban Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum memberikan makna bahwa pemerintah harus benar-benar memperhatikan dan memikirkan nasib warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik. Jika dilihat secara umum, yang dimaksud pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) dan tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan sifatnya pengangguran di bagi beberapa hal yaitu, Pengangguran Terbuka, Setengah Menganggur, dan Pengangguran Terselubung.

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, tidak sesuainya kompetensi pencari kerja dengan pasar kerja yang tersedia. Banyak tenaga kerja produktif di kota Pontianak yang justru gagal terserap dunia kerja akibat tidak punya kompetensi, atau punya kompetensi namun tidak selaras dengan lapangan kerja yang tersedia. Kurangnya lapangan pekerjaan yang diciptakan pemerintah dan pelaku industri kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat khususnya kota Pontianak ini masih sangat rendah yang mengakibatkan investor kurang tertarik untuk membuka industri

yang akan memunculkan lapangan pekerjaan di Kalimantan Barat. Dan juga rekrutmen yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi yang tersedia dipasar kerja.

Hal ini tentu tidak selaras dengan tujuan Pembangunan ketenagakerjaan dan keteransmigrasian di Kalimantan Barat yang mengacu kepada kepentingan Daerah dan Nasional sebagai suatu negara Kesatuan sesuai dengan salah satu tujuan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Barat, yaitu “Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat” yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Unit Latihan Kerja Industri (ULKI) Provinsi Kalimantan Barat ini memberikan berbagai pelatihan-pelatihan kerja guna untuk memudahkan para pencari kerja dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan mengurangi angka pengangguran yang ada. Berdasarkan dari sumber yang penulis dapat dari pegawai yang bertugas di Unit Latihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat bahwa pada tahun 90an lembaga ini membuat program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program ini masih terus berjalan hingga sekarang.

Penulis juga melampirkan data kelulusan dari beberapa substansi-substansi kejuruan dalam program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Dari yang sudah penulis amati bahwa di daerah Kalimantan Barat ini khususnya Kota Pontianak masih banyak usia angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Seperti yang kita tahu setiap orang harus mengonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, listrik, air bersih dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak

mempunyai penghasilan. Maka dari itu perlunya pemerintah dan pelaku industri dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Berikut ini penulis juga melampirkan data banyaknya jumlah pencari kerja menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pontianak.

Tabel 1.1

Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Pontianak 2020

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Pontianak Selatan	549	785	1.334	
Pontianak Tenggara	401	566	967	
Pontianak Timur	436	607	1.043	
Pontianak Barat	1.195	1.620	2.815	
Pontianak Kota	1.198	1.520	2.718	
Pontianak Utara	469	583	1.052	
	2020	4.248	5.681	9.929
	2019	1.920	2.036	3.956
	2018	459	507	966

Sumber: Dinsosnaker Kota Pontianak 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja di Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun 2018 hingga 2020, di Kecamatan Pontianak Selatan terdapat 1.334 orang, di Kecamatan Pontianak Tenggara terdapat 967 orang, di Kecamatan Pontianak Timur terdapat 1.043 orang, di Kecamatan Pontianak Barat terdapat 2.815 orang, di Kecamatan Pontianak Kota terdapat 2.718, dan di

Kecamatan Pontianak Utara terdapat 1.052. Tabel diatas juga menunjukkan jumlah pencari kerja terbanyak terdapat di Kecamatan Pontianak Barat dengan jumlah 2.815 orang, dan jumlah pencari kerjasemakin meningkat pertiga tahun dari tahun 2018 hingga 2020.

Tabel 1.2
REKAPTULASI PELATIHAN (MENJAHIT, TATA RIAS DAN ADM.
PERKANTORAN)
DI UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI PROV. KALBAR
TAHUN 2018-2020

NO	SUB KEJURUAN	TAHUN					
		2018		2019		2020	
		LULUS	TIDAK LULUS	LULUS	TIDAK LULUS	LULUS	TIDAK LULUS
1	MENJAHIT	32	0	15	1	16	0
2	TATA RIAS	79	1	60	4	15	1
3	ADM. PERKANTORAN	14	2	28	4	1	0
	JUMLAH	125	3	103	9	32	1
		128		112		33	

Sumber: ULKI (Unit Latihan Kerja Industri) Prov. Kalbar tahun 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 berjumlah 128 peserta yang terbagi 125 peserta yang lulus pelatihan dengan kejuruan yang berbeda-beda dan 3 peserta yang tidak lulus dengan kejuruan yang berbeda-beda. Pada tahun 2019 berjumlah 112 peserta yaitu 103 peserta yang lulus dan 9 peserta yang tidak lulus dan pada tahun 2020 berjumlah 33 peserta yaitu 32 peserta yang lulus dan 1 peserta yang tidak lulus. Dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta yang lulus paling banyak terjadi di tahun 2018 dengan jumlah 125 peserta, hal ini tidak menjamin keberhasilan dari tujuan dibuatnya program tersebut. Penulis juga

melampirkan data yang ada di ULKI tentang peserta yang telah mendapatkan pekerjaan, sebagai berikut :

Tabel 1.3
DATA PESERTA LULUSAN PELATIHAN (MENJAHIT, TATA RIAS, DAN
ADM. PERKANTORAN)
DI UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI (ULKI) PROV. KALBAR
TAHUN 2020

NO	SUB KEJURUAN	NAMA	PEKERJAAN	LOKASI
1	MENJAHIT	HERLINDA	PENJAHIT LINDA	JL. KOMYOS SUDARSO
2	TATA RIAS	ROSANITA	SALON BEBI	JL. SLAMAT II
		YANTI	SALON YANTI	JL. PENJARA
3	ADM. PERKANTORAN	MAYA	GAPURA ANGKASA	SUPADIO

Sumber : ULKI (Unit Latihan Kerja Industri) Prov. Kalbar Tahun 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 peserta lulusan pelatihan berjumlah 4 peserta yang telah mendapatkan pekerjaan. Dengan sub kejuruan yang berbeda yaitu menjahit berjumlah 1 orang, tata rias berjumlah 2 orang, dan administrasi perkantoran berjumlah 1 orang. Dari data tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa tidak ada pendataan khusus oleh pihak ULKI tentang peserta lulusan pelatihan yang telah mendapatkan pekerjaan maupun tidak, disebabkan oleh tidak ada peraturan khusus yang dilakukan oleh pihak ULKI kepada peserta lulusan untuk memberitahukan ketika mereka telah mendapatkan pekerjaan.

Pihak ULKI juga mengatakan bahwa banyak peserta lulusan pelatihan yang tidak dapat dihubungi kembali setelah dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat. Peserta-peserta yang telah dinyatakan lulus belum tentu mendapatkan pekerjaan dengan waktu yang singkat meskipun memiliki pembekalan yang cukup. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi lowongan pekerjaan yang terbuka secara umum. Adapun sebagian peserta yang dinyatakan lulus dapat

memanfaatkan ilmu kejuruan yang mereka pelajari dengan cara berwirausaha apabila memiliki modal.

Berdasarkan fenomena tersebut pada kenyataannya yang terjadi dilapangan peserta yang mengikuti program menjahit, tata rias dan administrasi perkantoran di Unit Latihan Kerja Industri masih sulit mendapatkan pekerjaan karena disebabkan Informasi tentang rekrutmen yang disebarkan tidak sesuai dengan kebutuhan pelatihan dengan kursus yang di adakan. Misalnya seseorang yang mempunyai bakat di bidang tata rias malah mengikuti kursus di bidang administrasi perkantoran.

Begitu juga seseorang yang dikirim dari desa untuk di berikan keterampilan di ULKI yang dikira hanya sekedar syarat untuk memenuhi kuota rekrutmen tanpa melihat bakat atau keterampilan yang sebenarnya ia miliki. Sehingga hal ini memberikan dampak pada perekrutan terhadap sasaran, sehingga sasaran kebijakan kesulitan untuk mengembangkan keterampilan diri akibat ketidaksesuaian pelatihan keterampilan yang di berikan. Dalam program tersebut beberapa kegiatan di lakukan sesuai kebutuhan pesaing kerja. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan Bab 1 pasal 1 ayat 17 sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, dan etos kerja pada kerja keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jejaring dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan beberapa identifikasi masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian sebagai berikut:

1. Tidak sesuai kompetensi para pencari kerja dengan pasar kerja.
2. Kurangnya lapangan pekerjaan yang diciptakan pemerintah dan pelaku industri kepada masyarakat.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian ini dan juga berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini difokuskan pada hasil Implementasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Rumusan Permasalahan

Mengapa Implementasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di Unit Latihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak belum berjalan dengan baik?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hasil Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dibuat oleh pemerintah dalam Unit Latihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak dengan cara melatih masyarakat

untuk berusaha mengembangkan bakat yang ada pada mereka, seperti menjahit, merias, mengoperasikan komputer, dan lain sebagainya.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang berkompeten, produktif dan memiliki daya saing tinggi yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja baru dan menciptakan wirausahawan baru, serta melihat apakah program tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Karena yang penulis lihat, masih saja ada banyak pengangguran khususnya di daerah Kota Pontianak ini yang belum mendapatkan pekerjaan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya untuk mengajak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan agar dapat berpartisipasi terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diterapkan dalam dunia nyata guna mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Pontianak, serta diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Dan memberikan manfaat bagi lembaga dalam membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.